

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyajikan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan Dana Perimbangan memiliki t_{hitung} sebesar -6.153 dengan nilai signifikan sebesar $0,103 > 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis pertama diterima.
2. Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan Belanja Daerah memiliki t_{hitung} sebesar -1.559 dengan nilai signifikan sebesar $0,363 > 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis kedua diterima.
3. Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki t_{hitung} sebesar 7.528 dengan nilai signifikansi sebesar $0,084 > 0,05$. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara piarsil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

5.2. Implikasi Teoritis

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, terutama untuk pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana publik (Ernawati, 2017: 2). Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan dan peraturannya sendiri untuk mengatur keseluruhan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerahnya, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber ekonomi dan sumber pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu indikator kemandirian suatu daerah diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya oleh karena itu, PAD memiliki peran yang penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah (Liando, 2017: 5). Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia khususnya dalam bidang keuangan daerah berkaitan dengan PAD belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Minimnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan untuk membiayai belanja daerah menunjukkan sebuah daerah belum mampu mengelola keuangannya yang berpotensi menimbulkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah sehingga akan menimbulkan jurang ketimpangan sosial dan kemiskinan.

Pernyataan tersebut bisa menggambarkan masih kurang optimal pengelolaan keuangan daerah sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk meminimalisir dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi dan kemampuan sumber daya daerahnya untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang maksimal juga.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan maka penulis memberikan beberapa implikasi terapan bagi tempat penelitian, sebagai berikut :

1. Dengan mempertimbangkan indikator dana perimbangan, maka diharapkan kepada pemerintah daerah agar semakin bijak lagi dalam mengelola realisasi APBD yang berdampak pada kinerja keuangan daerah.
2. Dengan mempertimbangkan indikator belanja daerah, maka diharapkan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam bentuk berbagai fasilitas dan pelayanan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.
3. Dengan mempertimbangkan indikator pendapatan asli daerah, maka diharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih tinggi menghasilkan pendapatan asli daerah supaya dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.